

- berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. H. ABDUL LATIF (Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021). Sprin.Dik-08/ DIK.00/01/01/2018 Tanggal 12 Januari 2018. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 26 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 127/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 26 Desember 2022.
222. Perkara TPK Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua atas nama tersangka ELTINUS OMALENG (Bupati Mimika periode 2014-2019) bersama-sama dengan tersangka MARTHEN SAWY (PPK) Sprin.Dik/58/DIK.00/01/09/2020 tanggal 30 September 2020. Nota Dinas Nomor 626/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 129/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 29 Desember 2022
223. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Theodorus Yosep Parera (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/94/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 622/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 130/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 29 Desember 2022.
224. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Eko Suparno (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/95/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 623/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 29 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 131/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 29 Desember 2022.
225. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak, atas nama tersangka ANGIN PRAYITNO AJI (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/107/DIK.00/01/12/2021, tanggal 29 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 629/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor: 133/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.
226. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka VICTOR SITORUS (Swasta - Kontraktor). Sprin.Dik/19/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 627/DIK.02.00/23/11/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sprin.Juk Nomor 134/TUT.01.00/24/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.

PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)

Perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tahun 2022 adalah sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) perkara yaitu:

Januari

1. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa HADINOTO SOEDIGNO selaku Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2007-2012 yang diberikan oleh Soetikno Soedarjo selaku Beneficial Owner Connaught International Pte.

Ltd. dan kawan-kawan, terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sprin.Dik/79/DIK.00/01/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 712/DIK.02.00/23/12/2020 tanggal 23 Desember 2020. Sprin.Juk Nomor: 114/TUT.01.00/24/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Putusan PT 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tanggal 3 November 2021.

2. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa HADINOTO SOEDIGNO (Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2007-2012) yang diberikan oleh Soetikno Soedarjo (Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd.) dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sprin.Dik/71/DIK.00/01/11/2020, tanggal 20 November 2020. Nota Dinas Nomor 713/DIK.02.00/23/12/2020 tanggal 23 Desember 2020. Sprin.Juk Nomor: 115/TUT.01.00/24/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Putusan PT 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tanggal 3 November 2021.
3. Perkara TPK yaitu dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka NURHADI bersama-sama dengan REZKY HERBIYONO terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar Tahun 2015 s.d 2016 dan atau perbuatan penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama terpidana Ferdy Yuman, SE. Sprin.Dik/01/DIK.00/01/01/2021 tanggal 5 Januari 2021. Sprin.Juk Nomor : 45/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 07 Mei 2021. Putusan PT 40/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 27 Desember 2021
4. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam mendapatkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa PAUT SYAKARIN (Swasta). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 605/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 76/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 31/Pis.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 5 Januari 2022.
5. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 oleh Terdakwa SRI WAHYUMI MARIA MANALIP (Bupati Talaud periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/11/2020, tanggal 4 November 2020. Nota Dinas Nomor 494/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor : 69/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021. Putusan PN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 25 Januari 2022.
6. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari M Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan M. Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai dan penerimaan lainnya atas nama Terdakwa STEPANUS ROBIN PATTUJU (Penyidik KPK). Sprin.Dik/29/DIK.00/01/04/2021, tanggal 22 April 2021. Nota Dinas Nomor 484/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021.

Sprin.Juk Nomor Nomor: 67/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Putusan PN Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2022.

7. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari M Syahrial selaku Walikota Tarijing Balai periode 2016-2021 terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan M. Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai dan penerimaan lainnya atas nama Terdakwa MASKUR HUSAIN (Pengacara). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/04/2021, tanggal 22 April 2021. Nota Dinas Nomor 485/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021.Sprin.Juk Nomor: 68/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Putusan PN Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2022.
8. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa YUSMADA (Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai) terkait lelang / mutasi jabatan di Pemerintah kota Tanjungbalai Tahun 2019 kepada M. Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai periode 2016 s.d. 2021. Sprin.Dik/27/DIK.00/01/04/2021, tanggal 15 April 2021. Nota Dinas Nomor 635/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 82/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 86/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mdn tanggal 24 Januari 2022.
9. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 s.d. 2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014 atas nama Terdakwa KI AGUS EMIL FAHMY CORNAIN (Pemilik PT. Ayodya Multi Sarana - Swasta). Sprin.Dik/59/DIK.00/01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 556/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 16 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 72/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 16 September 2021. Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2022.
10. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 s.d. 2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014 atas nama Terdakwa SOLIHAN (Direktur Keuangan dan Investasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 – 2016). Sprin.Dik/60/DIK.00/01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 557/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 16 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 73/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 16 September 2021. Putusan PN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2022.
11. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas atau Pemberian Perizinan keluar Lembaga Masyarakat Klas 1 Sukamiskin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA als WAWAN (Warga Binaan Lembaga Masyarakat Klas 1 Sukamiskin). Sprin.Dik/96/DIK.00/01/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 486/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 66/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Putusan PN Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Januari 2022.
12. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggotahun 2021 kepada Doody Kurniawan bersama -sama dengan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018- 2023 dan Hasan Aminuddin atas nama Terdakwa SUMARTO (PNS). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/08/2021,

tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 645/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 83/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 26 Januari 2022.

13. Perkara TPK pada kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sumber dana APBD TA. 2013 atas nama Terdakwa JOHAN ANUAR (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2009 – 2014). Sprin.Dik/61/DIK.00/01/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 646/DIK.02.00/23/12/2020 tanggal 10 Desember 2020. Sprin.Juk Nomor: 111/TUT.01.00/24/12/2020 tanggal 10 Desember 2020. Putusan MA Nomor 34 K/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Januari 2022.
14. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018-2023 melalui Hasan Aminuddin dan Doody Kurniawan atas nama Terdakwa ALI Wafa, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, NURUL HADI (masing-masing ASN Pemkab Probolinggo). Sprin.Dik/49/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 644/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 84/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 31 Januari 2022.
15. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018-2023 melalui Hasan Aminuddin dan Muhamad Ridwan atas nama Terdakwa NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO, SAMSUDDIN (masing-masing ASN Pemkab Probolinggo). Sprin.Dik/50/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 643/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 85/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 31 Januari 2022.

Februari

16. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk tahun pajak 2016, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 atas nama Terdakwa DADAN RAMDANI (Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/04/DIK.00/01/02/2021, tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 531/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 13 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 71/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 13 September 2021. Putusan PN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2022.
17. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama Terdakwa MARHAINI (Direktur CV Hanamas – Swasta). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 661/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 12 November 2021. Sprin.Juk Nomor : 86/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 12 November 2021. Putusan PN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BJM tanggal 7 Februari 2022.
18. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan

barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama Terdakwa FACHRIADI (Direktur CV Kalpataru – swasta). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 661/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 12 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 87/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 12 November 2021. Putusan PN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BJM tanggal 7 Februari 2022.

19. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Stepanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah atas nama Terdakwa MUHAMMAD AZIS SYAMSUDDIN (Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/09/2021, tanggal 2 September 2021. Nota Dinas Nomor 673/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 22 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 89/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 22 November 2021. Putusan PN Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2022.
20. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 atas nama Terdakwa H.M. ANZARULLAH (Kepala BPBD Kabupaten Kolaka Timur). Sprin.Dik/71/DIK.00/01/09/2021, tanggal 22 September 2021. Nota Dinas Nomor 672/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 19 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 88/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 19 November 2021. Putusan PN Nomor 49/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.KDI tanggal 22 Februari 2022.
21. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terdakwa YOORY CORNELES (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya) bersama-sama dengan Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/13/DIK.00/01/02/2021, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 586/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 23 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 74/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 23 September 2021. Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2022.
22. Perkara TPK terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Atas nama Terdakwa JAROT SUBANA (Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi Sipil/ Divisi II/ Divisi III, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/07/2020 tanggal 13 Juli 2020. Nota Dinas Nomor 558/DIK.02.00/23/11/2020 tanggal 19 November 2020. Sprin.Juk Nomor: 101/TUT.01.00/24/11/2020 tanggal 19 November 2020. Putusan MA Nomor 944 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Maret

23. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa EDHY PRABOWO (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia), terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 dari Suharjito dan kawan-kawan. Sprin.Dik/73/DIK.00/01/11/2020, tanggal 25 November 2020. Nota Dinas Nomor 257/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 24 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 31/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 24 Maret 2021. Putusan MA Nomor 942 K.Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022.
24. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Yaya Purnomo selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai atas nama Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNAN SINGKAH (Walikota Dumai periode tahun 2016-2021). Sprin.Dik/35/DIK.00/01/04/2019 tanggal 22 April 2019. Nota Dinas Nomor 221/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 28/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Putusan MA Nomor 926

K/Pid.Sus/2022 tanggal 17 Maret 2022.

25. Perkara TPK menerima hadiah atau janji atas nama Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNAN SINGKAH (Walikota Dumai periode tahun 2016-2021). Sprin.Dik/36/DIK.00/01/04/2019 tanggal 22 April 2019. Nota Dinas Nomor 222/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 29/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Putusan MA Nomor 926 K/Pid.Sus/2022 tanggal 17 Maret 2022.
26. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019 an. Terdakwa ABDUL ROZAQ MUSLIM (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019). Sprin.Dik/53/DIK.00/01/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Nota Dinas Nomor 259/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 34/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Putusan MA Nomor 1229 K/Pid.Sus/2022 tanggal 24 Maret 2022.
27. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan Persetujuan Penempatan Pembangunan Kebun Kemitraan dalam rangka perpanjangan Hak Guna Usaha perkebunan PT Adimulia Agrolestari Tahun 2021 atas nama Terdakwa SUDARSO (General Manager PT Adimulya Agro Lestari/ swasta). Sprin.Dik/78/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 720/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 17 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 97/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 17 Desember 2021. Putusan PN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 28 Maret 2022.
28. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek dan penerbitan perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA (Wali Kota Cimahi periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022). Sprin.Dik/76/DIK.00/01/11/2020 tanggal 28 November 2020. Nota Dinas Nomor 258/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 33/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Putusan PN 1122 K/Pid.Sus/2022 tanggal 17 Maret 2022.
29. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs. Yaitu memberi hadiah atau janji kepada Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022 dkk terkait dengan proyek-proyek di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin Tahun Anggaran 2021 atas nama Terpidana SUHANDY (swasta). Sprin.Dik/715/ DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Sprin.juk Nomor : 94/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Putusan PN Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 15 Maret 2022.

April

30. Perkara TPK atas nama Terdakwa AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA (PNS) bersama-sama Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014 - 2019 dan SYAHBUDIN (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara) yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sprin.Dik/25/DIK.00/01/04/2021, tanggal 13 April 2021. Nota Dinas Nomor 708/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 91/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Putusan PN 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tg.Krg tanggal 13 April 2022.
31. Perkara TPK terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan bebas an pelabuhan bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016

- s.d. 2018 yang dilakukan oleh ybs selaku Bupati Bintan Ex Officio Wakil Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan atas nama Terpidana APRI SUJADI (Bupati Bintan). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/02/2021 tanggal 17 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 705/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor 92/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Putusan PN 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg tanggal 21 April 2022.
32. Perkara TPK terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan bebas an pelabuhan bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s.d. 2018 atas nama Terpidana MOHD. SALEH H. UMAR (Plt. Kepala Badan Pengusahaan Bintan). Sprin.Dik/10/DIK.00/01/02/2021, tanggal 17 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 706/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 93/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Putusan PN 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg tanggal 21 April 2022.
 33. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama tersangka MALIKI (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Hulu Sungai Utara). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 12/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 02/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Putusan PN 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tanggal 13 April 2022.
 34. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia yang secara bersama-sama dengan Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Dirgantara dan Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia, dkk dalam kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d. 2017 atas nama Terpidana BUDIMAN SALEH (Direktur Aircraft Integration PT Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2010 s.d. 2012 dan Direktur Niaga Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2012 s.d. 2017). Sprin.Dik/26/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 177/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 1 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 24/TUT.01.00/24/03/2020 tanggal 1 Maret 2021. Putusan MA 1411 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 7 April 2022.
 35. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs selaku Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia yang secara bersama sama atau turut serta dengan Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia dan Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia, dkk dalam kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d. 2017 atas nama Terpidana ARIE WIBOWO (Pensiunan Pegawai PT Dirgantara Indonesia (Persero)). Sprin.Dik/27/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 188/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 26/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Putusan MA 1415 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 7 April 2022.
 36. Perkara TPK dalam kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia Tahun 2007 s.d. 2017 yang dilakukan oleh ybs selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bersama-sama dengan Irzal Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT Abadi Sentosa Perkasa atas nama Terpidana DIDI LAKSAMANA (Swasta/Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa). Sprin.Dik/28/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 201/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 5 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 27/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 8 Maret 2021. Putusan MA 1413 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 April 2022.

Mei

37. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa ISHAK JOHARSYAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/59/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 775/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 100/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
38. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa MARSITO (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/61/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 777/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 101/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
39. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa MUHARDI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/62/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 778/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 102/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
40. Perkara TPK bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa AHMAD REO KOSUMA (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/55/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 771/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 103/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
41. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa ARI YOCA SETIADI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/56/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 772/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 104/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.

42. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa FITRIANZAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/57/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 773/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 105/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
43. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa INDRA GANI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/58/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 774/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 106/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
44. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa MARDIANSYAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/60/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 776/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 107/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
45. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa PIARDI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/63/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 780/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 108/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
46. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa SUBAHAN (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 s.d 2019). Sprin.Dik/64/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 779/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 109/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
47. Perkara TPK orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu

kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupten Penajam Paser Utara atas nama Terpidana AHMAD ZUHDI ALIAS YUDI (Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri d/a perumahan Rawa Indah, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/12/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 114/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 11 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 20/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 11 Maret 2022. Putusan PN 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 31 Mei 2022.

48. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji atas nama Tersangka M. SYAHRIAL (Walikota Tanjungbalai periode 2016 s.d. 2021) terkait lelang / mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dari Yusmada. Sprin.Dik/28/DIK.00/01/04/2021, tanggal 15 April 2021. Nota Dinas Nomor 68/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 31 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 07/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 31 Januari 2022. Putusan PN 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 30 Mei 2022.
49. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada DR. dr. Herman Sutrisno, MM selaku Walikota Banjar periode 2008-2013, terkait proyek pada Dinas PUPR Kota Banjar atas nama tersangka RAHMAT WARDI (Swasta). Sprin.Dik/42/DIK.00/01/06/2020 tanggal 30 Juni 2020. Nota Dinas Nomor 87/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 17 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 42/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 20 April 2022. Putusan PN Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 25 Mei 2022.
50. Perkara TPK yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016 atas nama Terdakwa ARIF HENDRAWAN (Direktur PT Wahyu Daya Mandiri/ peg BUMN). Sprin.Dik/72/DIK.00/01/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 786/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 113/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Putusan PN Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2022.
51. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa FAHRURROZI, ARRAKHMAT EKA PUTRA, WIWID ISWHARA dan ZAINUL ARFAN (masing-masing anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 619/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 81/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Putusan PT Nomor: 5/Pid-TPK/2022/PT JMB tanggal 18 Mei 2022.
52. Perkara TPK penyelenggara negara (Drs. Wenny Bukamo (Bupati Banggai Laut 2016-2021)) yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa RECKY SUHARTONO GODIMAN (Komisaris Utama PT ABG (Alfa Berdikari Group) - Swasta). Sprin.Dik/85/DIK.00/01/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Nota Dinas Nomor 293/DIK.02.00/23/04/2021 tanggal 1 April 2021. Sprin.Juk Nomor : 39/TUT.01.00/24/04/2021 tanggal 1 April 2021. Putusan MA 2211 K/Pid.Sus/2022 tanggal 24 Mei 2022

Juni

53. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama Terdakwa HANDOKO SETIONO (Swasta – Komisaris PT. Arta Niaga Nusantara). Sprin.Dik/10/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 389/DIK.02.00/23/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. Sprin.Juk Nomor : 50/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 04 Juni 2021. Putusan MA 226 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Juni 2022.
54. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama Terdakwa MELIA BOENTARAN (Swasta – Direktur PT. Arta Niaga Nusantara). Sprin.Dik/11/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 390/DIK.02.00/23/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. Sprin.Juk Nomor : 51/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 04 Juni 2021. Putusan MA 226 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Juni 2022.
55. Perkara TPK bersama-sama dengan IR. Djoko Saputro selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dkk terkait pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun Anggaran 2017 atas nama Terdakwa ANDRIRINI YAKTININGSASI (Swasta). Sprin.Dik/173/DIK.00/01/11/2018 Tanggal 28/11/2018. Nota Dinas Nomor 787/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 111/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Putusan 10/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 6 Juni 2022.
56. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah kota Bekasi tahun 2021 atas nama tersangka ALI AMRIL (Direktur PT MAM Energindo – Swasta). Sprin.Dik/03/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 105/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 15/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 6 Juni 2022.
57. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah kota Bekasi tahun 2021 atas nama tersangka MAKHFUD SAIFUDIN (Camat Rawalumbu - Bekasi). Sprin.Dik/04/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 108/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 16/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 6 Juni 2022.
58. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah kota Bekasi tahun 2021 atas nama tersangka LAI BUI MIN (Swasta). Sprin.Dik/01/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 106/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 17/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022. Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 6 Juni 2022.
59. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah kota Bekasi tahun 2021 atas nama tersangka SURYADI MULYA (Direktur PT Kota Binrang Rayatri – Swasta). Sprin.Dik/02/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 107/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 18/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 6 Juni 2022.
60. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019 terkait

Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Terdakwa SAMIN TAN (Pemilik PT Borneo Lumbang Energi & Metal). Sprin.Dik/17/DIK.00/01/02/2019 Tanggal 01 Februari 2019. Sprin.Juk Nomor 49/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 03 Juni 2021. Putusan MA 2205 K /Pid.Sus/2022 tanggal 9 Juni 2022.

61. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama tersangka MUARA PERANGIN ANGIN (Swasta). Sprin.Dik/21/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 125/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 18 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 23/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 18 Maret 2022. Putusan PN 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2022
62. Perkara TPK dalam kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi; Kegiatan Sepeda Sehat Dalam Rangka Sosialisasi Hemat Energi; dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat Jenderal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka SRI UTAMI (Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM). Sprin.Dik-23/01/03/2017 Tanggal 31 Maret 2017. Nota Dinas Nomor 67/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 06/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Putusan PN Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2022.
63. Perkara TPK penyelenggara negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa JUARSAH (Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020). Sprin.Dik/02/DIK.00/01/01/2021 tanggal 20 Januari 2021. Nota Dinas Nomor 399/DIK.02.00/23/06/2021 tanggal 14 Juni 2021. Sprin.Juk Nomor : 52/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 14 Juni 2021. Putusan MA 2213 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Juni 2022.
64. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 atas nama Terdakwa ADE BARKAH SURAHMAN. (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014 s.d. 2019 serta Periode tahun 2019 s.d 2024). Sprin.Dik/11/DIK.00/01/02/2021, tanggal 22 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 475/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 64/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Putusan MA 2807 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 Juni 2022.
65. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA Tbk tahun pajak 2016, dan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 atas nama Terdakwa WAWAN RIDWAN (Supervisor Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/82/DIK.00/01/11/2021, tanggal 4 November 2021. Nota Dinas Nomor 881/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 123/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Putusan PN Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2022.
66. Perkara TPK berupa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terdakwa WAWAN RIDWAN

(Supervisor Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/84/DIK.00/01/11/2021, tanggal 4 November 2021. Nota Dinas Nomor 882/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 124/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Putusan PN Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2022.

67. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan; pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa WAWAN RIDWAN (Supervisor Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/85/DIK.00/01/11/2021, tanggal 4 November 2021. Nota Dinas Nomor 883/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 125/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Putusan PN Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2022.

Juli

68. Perkara TPK dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa Hobby Siregar selaku Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction dan kawan-kawan Sprin.Dik-58/01/07/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Sprin.Juk Nomor : 51/TUT.01.00/24/04/2019 tanggal 02 April 2019. Putusan MA 3179 K/Pid.Sus/2020 tanggal 21 Juli 2021 Meninggal. Nodis JPU 28 April 2022.
69. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun anggaran 2017 s.d. 2019 yang dilakukan oleh ybs. Selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 2014 s.d. 2019 dan 2019 s.d. 2024 atas nama terpidana Siti Aisyah Tuti Handayani (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat 2014 s.d. 2019). Sprin.Dik/474/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor : 65/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Putusan MA 2797 K/Pid.Sus/2022 tanggal 6 Juli 2022.
70. Perkara TPK terkait dengan setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015 atas nama Terdakwa PRIYADI KARDONO (Kepala BIG 2014-2016). Sprin.Dik/55/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Nota Dinas Nomor 376/DIK.02.00/23/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Sprin.Juk Nomor: 46/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Putusan MA 2771 K/pid.Sus/2022 tanggal 1 Juli 2022.
71. Perkara TPK terkait dengan setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

tahun 2015 atas nama Terdakwa MUCHAMAD MUCHLIS (Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)). Sprin.Dik/56/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Nota Dinas Nomor 377/DIK.02.00/23/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Sprin.Juk Nomor 47/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Putusan MA 2771 K/pid.Sus/2022 tanggal 1 Juli 2022.

72. Perkara TPK terkait dengan setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015 atas nama Terdakwa LISSA RUKMI UTARI (Komisaris Utama PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA dan Direktur Utama PT WAINDO SPECTERRA INDONESIA - Swasta). Sprin.Dik/57/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Nota Dinas Nomor 378/DIK.02.00/23/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Sprin.Juk Nomor : 48/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Putusan MA 2769 K/Pid.Sus/2022 tanggal 1 Juli 2022
73. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 atas nama terdakwa APIF FIRMANSYAH (Mantan Asisten Pribadi Zumi Zola). Sprin.Dik/34/DIK.00/01/06/2021, tanggal 18 Juni 2021. Nota Dinas Nomor 98/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 1 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 13/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 01 Maret 2022. Putusan PN 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jambi tanggal 21 Juli 2022.
74. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya atas nama tersangka APIF FIRMANSYAH (Mantan Asisten Pribadi Zumi Zola). Sprin.Dik/35/DIK.00/01/06/2021, tanggal 18 Juni 2021. Nota Dinas Nomor 99/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 1 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 14/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 01 Maret 2022. Putusan PN 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jambi tanggal 21 Juli 2022.
75. Perkara TPK bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan RAPBD.P TA 2014 dan atau RAPBD TA 2015 pada Provinsi Riau atas nama terdakwa H. Annas Ma'amun. Sprin.Dik-01/01/01/2015. Nota Dinas 175/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 18 April 2022. Sprin.Juk Nomor 41/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 18 April 2022. Putusan PN 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 28 Juli 2022.
76. Perkara TPK atas nama Terdakwa AA UMBARA SUTISNA (Bupati Bandung Barat periode 2018-2023) dan kawan-kawan, yaitu baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya terkait pengadaan barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 dan atau melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi serta menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sprin.Dik/17/DIK.00/01/02/2020, tanggal 26 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 463/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 62/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021. Putusan MA 2910 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 Juli 2022.

Agustus

77. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DONO PURWOKO (kadiv adhi karya BUMN). Sprin.Dik/135/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018. Nota Dinas Nomor 111/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 9 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 19/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 09 Maret 2022. Putusan PN 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Agustus 2022.
78. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh terdakwa IVANA KWELJU, yaitu memberi hadiah atau janji terkait terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kola Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 bersama-sama JOHNY RYNHARD KASMAN. Sprin.Dik/43/DIK.00/01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 202/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 48/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 9 Agustus 2022.
79. Perkara TPK berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada ANGIN PRAYITNO AJI, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bersama-sama dengan DADAN RAMDANI selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Terdakwa AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak dan kawan-kawan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Tahun Pajak 2016. Sprin.Dik/05/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 172/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 14 April 2022. Sprin.Juk Nomor 39/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 14 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2022.
80. Perkara TPK berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bersama-sama dengan DADAN RAMDANI selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Terdakwa RYAN AHMAD RONAS selaku konsultan pajak dan kawan-kawan terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Tahun Pajak 2016. Sprin.Dik/06/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 173/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 14 April 2022. Sprin.Juk Nomor 40/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 14 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2022.
81. Perkara TPK atas nama Terdakwa M. TOTOH GUNAWAN (Swasta - PT. Jagat Dir Gantara dan CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang) bersama-sama Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 dan Andri Wibawa, yaitu baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya terkait Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 dan atau melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sprin.Dik/19/DIK.00/01/02/2021, tanggal 26 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 460/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 27 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 61/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 29 Juli 2021. Putusan MA 2926 K/Pid.Sus/2022 tanggal 16 Agustus 2022

September

82. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa Agus Firmansyah (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/87/DIK.00/01/11/2021, tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 167/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 24/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
83. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa Mardalena (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/95/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 162/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 25/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
84. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa Misran (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/96/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 161/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 26/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
85. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa Ahmad Fauzi (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/88/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 153/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 27/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
86. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Verra Erika (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/100/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 165/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 28/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
87. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah

atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Daraini (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/89/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 155/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 30/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.

88. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Eksa Hariawan (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/90/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 156/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 31/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
89. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Elizon (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Nota Dinas Nomor 157/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 32/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
90. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Irul (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/94/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 163/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 33/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
91. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa Hendly (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/93/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 154/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 34/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
92. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama Terdakwa Samudera Kelana (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Nota Dinas Nomor 160/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 36/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.

93. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama tersangka Umam Pajri (Mantan anggota DPRD Kab. Muara Enim periode 2014-2019). Sprin.Dik/99/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Nota Dinas Nomor 164/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022. Sprin.Juk Nomor 38/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 7 September 2022.
94. Perkara TPPU yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI WIDIANA ADIA (Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019). Sprin.Dik-13/DIK.00/01/01/2018 Tanggal 19 Januari 2018. Nota Dinas Nomor 693/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 26 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 90/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 26 November 2021. Putusan PN 79/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 6 September 2022.
95. Perkara TPK pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kasawan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 s.d. TA 2011 atas nama Terdakwa PT. NINDYA KARYA (persero) (Korporasi). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/02/2018 Tgl. 19 Februari 2018. Nota Dinas Nomor 790/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 118/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Putusan PN 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 22 September 2022.
96. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MAULANA ADAM, RIZKI TAUFIK HIDAYAT dan IHSAN AYATULLAH bersama sama dengan ADE YASIN selaku Bupati Bogor periode 2018-2023 atas nama tersangka Ihsan Ayatullah, Maulana Adam dan Rizki Taufik Hidayat (PNS Kab. Bogor). Sprin.Dik/38/DIK.00/01/04/2022 tanggal 27 April 2022. Nota Dinas Nomor 306/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 24 Juni 2022. Sprin.Juk Nomor 72/TUT.01.00/24/06/2022 tanggal 24 Juni 2022. Putusan PN 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 23 September 2022.
97. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama terdakwa Abdul Gafur Mas'ud (Bupati Penajam Paser Utara periode 2018 s.d. 2023). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022. Nota Dinas Nomor 231/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 51/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smr tanggal 26 September 2022.

98. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama terdakwa Nur Afifah Balgis (Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan). Sprin.Dik/17/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 230/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 55/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr tanggal 26 September 2022.
99. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama terdakwa Muliadi (Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/14/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 232/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 52/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr tanggal 26 September 2022.
100. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama terdakwa Edi Hasgoro (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/15/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 228/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 53/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr tanggal 26 September 2022.
101. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama terdakwa Jusman (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/16/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 229/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 54/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr tanggal 26 September 2022.
102. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 atas nama terdakwa Laode M Syukur (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna). Sprin.Dik/102/DIK.00/01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 253/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 23 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 65/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 23 Mei 2022. Putusan PN 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 28 September 2022.
103. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 yang dilakukan oleh Ybs selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri periode Juli 2020

sampai dengan November 2021 dan kawan-kawan atas nama terdakwa Mochamad Ardian Noervianto (PNS Kementerian Dalam Negeri). Sprin.Dik/102/DIK.00/01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 266/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 68/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Putusan PN Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 28 September 2022.

104. Perkara TPK dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co, Ltd (HDHM) dari China sebagai penyedia barang atas nama Terdakwa R.J. LINO (Dirut PT. Pelindo II) dkk. Sprin.Dik-55/01/12/2015. Nota Dinas Nomor 443/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 19 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 56/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 19 Juli 2021. Putusan MA 5124 K/Pid.Sus/2022 tanggal 9 September 2022
105. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI dan penerimaan gratifikasi atas nama Terdakwa ROHADI (Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dan PN Bekasi). Sprin.Dik-56/01/08/2016. Nota Dinas Nomor 13/DIK.02.00/23/01/2021 tanggal 7 Januari 2021. Sprin.Juk Nomor 01/TUT.01.00/24/01/2020 tanggal 7 Januari 2021. Putusan MA 1551 K/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022.
106. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama Terdakwa ROHADI (Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dan PN Bekasi). Sprin.Dik-57/01/08/2016. Nota Dinas Nomor 14/DIK.02.00/23/01/2021 tanggal 7 Januari 2021. Sprin.Juk Nomor 02/TUT.01.00/24/01/2021 tanggal 7 Januari 2021. Putusan MA 1551 K/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022.
107. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 atas nama terdakwa EDDY UMARI (Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin). Sprin.Dik/74/DIK.00/01/10/2021, tanggal 16 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 81/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 09/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Putusan PT 25/Pid.Sus-TPK/2022/PT.Plg tanggal 12 September 2022.
108. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 atas nama terdakwa HERMAN MAYORI (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin). Sprin.Dik/75/DIK.00/01/10/2021, tanggal 16 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 80/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 10/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Putusan PT 25/Pid.Sus-TPK/2022/PT.Plg tanggal 12 September 2022.

Oktober

109. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan lahan tahun 2021, proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama tahun 2021 dan pengisian tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022, meminta dan menerima pembayaran dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi dan penerimaan lain terkait jabatannya atas nama terdakwa Muhamad Bunyamin (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP).

- Sprin.Dik/06/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 204/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 44/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022.
110. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan lahan tahun 2021, proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama tahun 2021 dan pengisian tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022, meminta dan menerima pembayaran dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi dan penerimaan lain terkait jabatannya atas nama tersangka Mulyadi alias Bayong (Lurah Jati Sari-Bekasi). Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 205/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 45/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022.
 111. Perkara TPK menerima hadiah atau janji Terkait pengadaan lahan di wilayah Kota Bekasi Tahun 2021 atas nama terdakwa Jumhana Luthfi Amin (Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi). Sprin.Dik/08/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 206/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 46/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022.
 112. Perkara TPK menerima hadiah atau janji Terkait pengadaan lahan di wilayah Kota Bekasi Tahun 2021 atas nama terdakwa Wahyudin (Camat Jatisampurna-Bekasi). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 207/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 47/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022.
 113. Perkara TPK dalam proyek pengadaan barang dan/ jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 serta penerimaan lainnya atas nama terdakwa ABDUL WAHID (Bupati Hulu Sungai Utara periode 2017 s.d 2022). Sprin.Dik/86/DIK.00/01/11/2021, tanggal 11 November 2021. Nota Dinas Nomor 122/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 17 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 21/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 17 Maret 2022. Putusan PT 13/Pid.Sus/TPK/2022/PT.BJM tanggal 5 Oktober 2022.
 114. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan; pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama terdakwa ABDUL WAHID (Bupati Hulu Sungai Utara periode 2017 s.d 2022). Sprin.Dik/105/DIK.00/01/12/2021, tanggal 22 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 123/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 17 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 22/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 17 Maret 2022. Putusan PT 13/Pid.Sus/TPK/2022/PT.BJM tanggal 5 Oktober 2022.
 115. Perkara TPK terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa

ISNU EDHI WIJAYA selaku Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan. Sprin.Dik/83/DIK.00/01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 267/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 2 Juni 2022. Sprin.Juk Nomor 69/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 02 Juni 2022. Putusan PN 40/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2022.

116. Perkara TPK dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka HUSNI FAHMI selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi dalam rangka penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan. Sprin.Dik/84/DIK.00/01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 268/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 2 Juni 2022. Sprin.Juk Nomor 70/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 02 Juni 2022. Putusan PN 40/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2022
117. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Terdakwa FERRY SANTOSA S. selaku Mitra Penjualan PT. Dirgantara Indonesia, yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Terdakwa Budi Santoso selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia dan Terdakwa Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT. Dirgantara Indonesia dan kawan-kawan dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017. Sprin.Dik/29/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 189/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 25/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Putusan MA 1553 K/Pid.Sus/2022 tanggal 3 Oktober 2022
118. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama terdakwa ADI WIBOWO (Kadiv Waskita Karya BUMN). Sprin.Dik/133/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018. Nota Dinas Nomor 220/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 50/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2022.
119. Perkara TPK bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama tersangka M Hamdan (PNS (Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya)). Sprin.Dik/27/DIK.00/01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 248/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 62/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Putusan PN 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 11 Oktober 2022.
120. Perkara TPK setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

- Tindak pidana terkait dengan Permohonan Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa RM Hendro Kasiono (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/26/DIK.00/01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 246/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 61/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Putusan PN 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2022.
121. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama terdakwa Isfi Syahfitra (Wiraswasta). Sprin.Dik/22/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 238/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 56/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Putusan PN 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN,Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022.
 122. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama terdakwa Shuhanda Citra (Wiraswasta). Sprin.Dik/23/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 239/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 57/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Putusan PN 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN,Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022.
 123. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama terdakwa Marcos Surya Abdi (Wiraswasta). Sprin.Dik/24/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 240/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 58/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Putusan PN 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN,Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022.
 124. Perkara TPK yang dilakukan oleh Tersangka TIGOR PRAKASA yaitu memberi hadiah atau janji kepada SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung periode 2013-2018 dan kawan-kawan, terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung. Sprin.Dik/26/DIK.00/01/04/2021 tanggal 13 April 2021. Nota Dinas Nomor 212/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 9 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 49/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 09 Mei 2022. Putusan PT 59/Pid.Sus-TPK/2022/PT.Sby tanggal 6 Oktober 2022.
 125. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Oon Nursihono (Vice President Real Estate PT. Summarecon Agung, Tbk). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 330/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 73/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Putusan PN 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yky tanggal 31 Oktober 2022.

November

126. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 atas nama tersangka Sukarman Loke (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna). Sprin.Dik/55/DIK.00/01/06/2022 tanggal 6 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 384/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 81/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Putusan PN 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 30 November 2022
127. Perkara TPK dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d 2017 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa BUDI SANTOSO (BUMN - Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia) dan IRZAL RINALDI ZAILANI (BUMN - Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia). Sprin.Dik/25/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 418/DIK.02.00/23/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. Sprin.Juk Nomor: 83/TUT.01.00/24/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020. Putusan MA 1054/Pid.Sus/2022 tanggal 29 November 2022.
128. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 atas nama tersangka Hj. ANDI MERYA,SIP (Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026). Sprin.Dik/70/DIK.00/01/09/2021 tanggal 22 September 2021. Nota Dinas Nomor 382/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 79/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Putusan PN 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst tanggal 5 Desember 2022.
129. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 atas nama tersangka LM Rusdiyanto Emba (Wiraswasta). Sprin.Dik/54/DIK.00/01/06/2022 tanggal 6 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 383/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Putusan 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst tanggal 5 Desember 2022.
130. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terdakwa ANJA RUNTUWENE (Direktur PT Adonara Propertindo) bersama-sama dengan Tommy Adrian, Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/14/DIK.00/01/02/2020, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 77/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021. Putusan MA 7092 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022
131. Perkara TPK atas nama Terdakwa RUDY HARTONO ISKANDAR (Swasta) bersama-sama dengan Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, kota Jakarta Timur, Provinsi OKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/33/DIK.00/01/05/2021, tanggal 28 Mei 2021. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 78/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021. Putusan MA 7092 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022.
132. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terdakwa TOMMY ADRIAN (Direktur PT Adonara Propertindo) bersama-sama dengan Anja Runtuwene, Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan

Cipayung, kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/15/DIK.00/01/02/2020, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 79/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021. Putusan MA 7092 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022.

133. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Bank Pan Indonesia, Tbk tahun pajak 2016, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017 atas nama Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/03/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 501/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 70/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Putusan MA 6752 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2022.
134. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengurusan Restitusi Pajak Proyek Pembangunan Jalan Toi Solo Kertosono di Kantor Pajak Pratama Pare-Jawa Timur atas nama tersangka Tri Atmoko (Kuasa Wajib Pajak JO CRBC-WIKA-PP). Sprin.Dik/18/DIK.00/01/01/2022 tanggal 18 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 463/DIK.02.00/23/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022. Sprin.Juk Nomor 91/TUT.01.00/24/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022. Putusan PN 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Desember 2022.

D. EKSEKUSI

Pelaksanaan putusan (eksekusi) Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Sprin Eksekusi sebanyak 101 (seratus satu) perkara sebagai berikut:

Januari

1. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan atau perbuatan penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terpidana NURHADI & REZKY HERBIYONO. Sprin.Dik/144/DIK.00/01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019. Nota Dinas Nomor 391/DIK.02.00/23/09/2020 tanggal 29 September 2020. Sprin.Juk Nomor: 82/TUT.01.00/24/09/2020 tanggal 29 September 2020. Putusan MA Nomor 4147 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Desember 2021. Sprin.PPP-01/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 3 Januari 2022. Pidana Penjara masing-masing 6 (enam) tahun, dan denda masing-masing Rp.500.000.000,- subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan.
2. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada pejabat/penyelenggara negara terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atas nama Terpidana HIENDRA SOENJOTO. Sprin.Dik/143/DIK.00/01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019. Nota Dinas Nomor 703/DIK.02.00/23/12/2020 tanggal 23 Desember 2020. Sprin.Juk Nomor: 113/TUT.01.00/24/12/2020 tanggal 23 Desember 2020. Putusan MA Nomor 4555

- K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Desember 2021.
Sprin.PPP-02/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 5 Januari 2022.
Pidana penjara 4 tahun 6 Bulan, dan denda Rp.100.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
3. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh Terpidana SISWIDODO selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalimantan Barat, dkk. Sprin.Dik/124/DIK.00/01/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Nota Dinas Nomor 446/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 21 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 59/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 21 Juli 2021. Putusan PN Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 24 Desember 2021.
Sprin.PPP-03/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 5 Januari 2022.
Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, dan uang pengganti Rp.17.273.429.276,- subsidair 1 (satu) tahun dan
Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, atas nama Terpidana SISWIDODO selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalimantan Barat. Sprin.Dik/146/DIK.00/01/12/2019 tanggal 10 Desember 2019. Nota Dinas Nomor 447/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 21 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 60/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 21 Juli 2021. Putusan PN Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 24 Desember 2021.
Sprin.PPP-03/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 5 Januari 2022.
Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, dan uang pengganti Rp.17.273.429.276,- subsidair 1 (satu) tahun
4. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh Terpidana GUSMIN TUARITA selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018) dkk. Sprin.Dik/123/DIK.00/01/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Nota Dinas Nomor 444/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 21 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 57/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 21 Juli 2021. Putusan PN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 24 Desember 2021.
Sprin.PPP-04/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 5 Januari 2022.
Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, uang pengganti Rp.11.794.572.630,- subsidair 1 (satu) tahun. Dan
Perkara TPPU setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, atas nama Terpidana GUSMIN TUARITA selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018). Sprin.Dik/145/DIK.00/01/12/2019 tanggal 10 Desember 2019. Nota Dinas Nomor 445/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 21 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 58/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 21 Juli 2021. Putusan PN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 24 Desember 2021.
Sprin.PPP-04/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 5 Januari 2022.

- Pidana 4 (empat) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, uang pengganti Rp.11.794.572.630,- subsidair 1 (satu) tahun.
5. Perkara TPK sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 atas nama Terpidana CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/182/DIK.00/01/12/2018 Tanggal 12/12/2018. Nota Dinas Nomor 456/DIK.02.00/23/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Sprin.Juk Nomor: 84/TUT.01.00/24/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Putusan MA Nomor 4959 K/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Desember 2021. Sprin.PPP-05/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp.500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp.100.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, dan Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 Tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
6. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dalam mendapatkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Terpidana PAUT SYAKARIN (Swasta). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 605/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 76/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 31/Pis.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 5 Januari 2022. Sprin.PPP-06/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 24 Januari 2022. Pidana penjara 2 Tahun 6 Bulan, denda Rp.200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
7. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari M Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan M. Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai dan penerimaan lainnya atas nama Terpidana MASKUR HUSAIN (Pengacara). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/04/2021, tanggal 22 April 2021. Nota Dinas Nomor 485/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 68/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Putusan PN Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2022. Sprin.PPP-07/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Pidana penjara 9 (Sembilan) tahun, denda Rp.500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp.8.702.500.000,- dan USD.36.000,- subsidair 3 (tiga) tahun.
8. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari M Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan M. Syahrial selaku Walikota Tanjung Balai dan penerimaan lainnya atas nama Terpidana STEPANUS ROBIN PATTUJU (Penyidik KPK). Sprin.Dik/29/DIK.00/01/04/2021, tanggal 22 April 2021. Nota Dinas Nomor 484/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor Nomor: 67/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Putusan PN Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2022. Sprin.PPP-08/Eks.00.01/01-26/01/2022 tanggal 8 Januari 2022. Pidana penjara 11 (sebelas) tahun, denda Rp.500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp.2.322.577.000,- subsidair 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan.

Februari

9. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang dilakukan oleh Terpidana YUSMADA (Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai) terkait lelang / mutasi jabatan di Pemerintah kota Tanjungbalai Tahun 2019 kepada M. Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai periode 2016 s.d. 2021. Sprin.Dik/27/DIK.00/01/04/2021, tanggal 15 April 2021. Nota Dinas Nomor 635/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

- Sprin.Juk Nomor : 82/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 86/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mdn tanggal 24 Januari 2022.
 Sprin.PPP-09/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 2 Februari 2022.
 Pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda Rp.100.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
10. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 oleh Terpidana SRI WAHYUMI MARIA MANALIP (Bupati Talaud periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/11/2020, tanggal 4 November 2020. Nota Dinas Nomor 494/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor : 69/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021. Putusan PN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 25 Januari 2022.
 Sprin.PPP-10/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 2 Februari 2022.
 Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp.9.303.500.000,- subsidair 2 (dua) tahun.
11. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggotahun 2021 kepada Doody Kurniawan bersama -sama dengan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018- 2023 dan Hasan Aminuddin atas nama Terpidana SUMARTO (PNS). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 645/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 83/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 26 Januari 2022.
 Sprin.PPP-11/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 7 Februari 2022.
 Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp.50.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
12. Perkara TPK yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa Nurhadi, bersama sama dengan Rezky Herbiyono terkait dengan pengurusan suatu perkara yang dilakukan pada sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan atau perbuatan penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terpidana FERDY YUMAN (Wiraswasta). Sprin.Dik/01/DIK.00/01/01/2021 tanggal 5 Januari 2021. Sprin.Juk Nomor: 45/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 07 Mei 2021. Putusan PT Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 27 Desember 2021.
 Sprin.PPP-12/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 14 Februari 2022.
 Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp.500.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
13. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terpidana AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 bersama-sama Raden Syahril dan Syahbudin selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya masing-masing terkait pekerjaan-pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan penerimaan lainnya. Sprin.Dik/127/DIK.00/01/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019. Nota Dinas Nomor 61/DIK.02.00/23/02/2020 tanggal 3 Februari 2020. BP/09/DIK.02.00/23/01/2019 tanggal 24 Januari 2020. Sprin.Juk Nomor: 10/TUT.01.00/24/02/2020 tanggal 03 Februari 2020. Putusan PN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 2 Juli 2020. Putusan PK Nomor 293 PK/Pid.Sus/2021 Tanggal 25 Agustus 2021.
 Sprin.PPP-13/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 14 Februari 2022.

- Pidana penjara 5 tahun, denda Rp.750.000.000,- subsidair 8 (delapan) bulan, uang pengganti Rp.11.135.180.708,- subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
14. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 s.d. 2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014 atas nama Terpidana SOLIHAN (Direktur Keuangan dan Investasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 – 2016). Sprin.Dik/60/DIK.00/01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 557/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 16 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 73/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 16 September 2021. Putusan PN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2022. Sprin.PPP-14/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 15 Februari 2022. Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp.483.700.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
15. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 s.d. 2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014 atas nama Terpidana KI AGUS EMIL FAHMY CORNAIN (Pemilik PT. Ayodya Multi Sarana - Swasta). Sprin.Dik/59/DIK.00/01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 556/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 16 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 72/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 16 September 2021. Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2022. Sprin.PPP-15/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 15 Februari 2022. Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp.1.330.668.513,27.
16. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama Terpidana MARHAINI (Direktur CV Hanamas – Swasta). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 661/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 12 November 2021. Sprin.Juk Nomor : 86/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 12 November 2021. Putusan PN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BJM tanggal 7 Februari 2022. Sprin.PPP-16/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 17 Februari 2022. Pidana penjara 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan, denda Rp.50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
17. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama Terpidana FACHRIADI (Direktur CV Kalpataru – swasta). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 661/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 12 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 87/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 12 November 2021. Putusan PN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.BJM tanggal 7 Februari 2022. Sprin.PPP-17/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 17 Februari 2022. Pidana penjara 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan, denda Rp.50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
18. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Stepanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah atas nama Terpidana MUHAMMAD AZIS SYAMSUDDIN (Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/09/2021, tanggal 2 September 2021. Nota Dinas Nomor 673/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 22 November 2021. Sprin.Juk Nomor:

89/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 22 November 2021. Putusan PN Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 17 februari 2022.

Sprin.PPP-18/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 25 Februari 2022.

Pidana penjara 3 Tahun 6 Bulan, denda Rp.250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, dan Pencabutan Hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 4 (empat) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

19. Perkara TPK setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pemberian Fasilitas atau Pemberian Perizinan keluar Lembaga Masyarakatan Klas 1 Sukamiskin yang diduga dilakukan oleh Terpidana TUBAGUS CHAERI WARDANA als WAWAN (Warga Binaan Lembaga Masyarakatan Klas 1 Sukamiskin). Sprin.Dik/96/DIK.00/01/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 486/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 66/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Putusan PN Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Januari 2022.

Sprin.PPP-19/Eks.00.01/01-26/02/2022 tanggal 25 Februari 2022.

Pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp.150.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.

Maret

20. Perkara TPK dalam pengadaan pekerjaan peningakatan Jalan Kemiri-Depapre (112) 24 Km (DAK) di Kabupaten Jayapura dengan sumber dana APBD-P Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 atas nama Terpidana MIKAEL KAMBUAYA (Kadis Prov. Papua) dkk. Sprin.Dik-04/01/01/2017 Tanggal 19 Januari 2017. Nota Dinas Nomor: 578/DIK.02.00/23/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019. Sprin.Juk Nomor: 127/TUT.01.00/24/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019. Putusan PK Nomor: 511 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Sprin.PPP-20/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 2 Maret 2022.

Pidana badan 3 (tiga) Tahun, denda Rp.50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.

21. Perkara TPK terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Atas nama Terpidana JAROT SUBANA (Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi Sipil/ Divisi II/ Divisi III, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/07/2020 tanggal 13 Juli 2020. Nota Dinas Nomor 558/DIK.02.00/23/11/2020 tanggal 19 November 2020. Sprin.Juk Nomor: 101/TUT.01.00/24/11/2020 tanggal 19 November 2020. Putusan MA Nomor 944 K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Sprin.PPP-21/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 7 Maret 2022.

Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 2 (dua) Bulan, uang pengganti Rp.7.124.239.000,- subsidair 2 (dua) tahun.

22. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2018-2023 melalui Hasan Aminuddin dan Doody Kurniawan atas nama Terpidana ALI WAFI, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, NURUL HADI (masing-masing ASN Pemkab Probolinggo). Sprin.Dik/49/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 644/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 84/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 31 Januari 2022.

Sprin.PPP-22/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 9 Maret 2022.

Pidana penjara masing-masing 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, denda masing-masing Rp.50.000.000,- subsidiari 1 (satu) bulan.

23. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati

- Probolinggo periode 2018-2023 melalui Hasan Aminuddin dan Muhamad Ridwan atas nama Terpidana NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO, SAMSUDDIN (masing-masing ASN Pemkab Probolinggo). Sprin.Dik/50/DIK.00/01/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 643/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 85/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Putusan PN Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 31 Januari 2022.
Sprin.PPP-23/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 9 Maret 2022.
Pidana penjara masing-masing 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, denda masing-masing Rp.50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.
24. Perkara TPK atas nama terpidana DJOKO SUSILO sehubungan dengan pengadaan driving simulator roda dua (R 2) dan roda empat (R 4) pada Korps. Lalu-lintas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011. Putusan PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021 Tanggal 6 Mei 2021.
Sprin.PPP-24/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 9 Maret 2022.
Pidana penjara 18 (delapan belas) Tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (Sama dengan Putusan MA) subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp.32.000.000.000,- (Sama dengan Putusan MA), dan 'Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.
25. Perkara TPK atas nama terpidana AHMAD HIDAYAT MUS bersama-sama dengan Zainal Mus terkait Pengadaan Pembebasan Lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula. Sprin.Juk Nomor: 115/TUT.01.00/24/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018. BP/113/DIK.02.00/23/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018. Putusan PK Nomor: 489 PK/Pid.Sus/2021 Tanggal 8 Desember 2021
Sprin.PPP-25/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 16 Maret 2022.
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp.200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp.2.503.903.000,- (sama dengan putusan MA).
26. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terpidana YOORY CORNELES (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya) bersama-sama dengan Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggan, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/13/DIK.00/01/02/2021, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 586/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 23 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 74/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 23 September 2021. Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2022.
Sprin.PPP-26/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 16 Maret 2022.
Pidana penjara 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan, denda Rp.500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
27. Perkara TPK pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 atas nama Terpidana H.M. ANZARULLAH (Kepala BPBD Kabupaten Kolaka Timur). Sprin.Dik/71/DIK.00/01/09/2021, tanggal 22 September 2021. Nota Dinas Nomor 672/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 19 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 88/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 19 November 2021. Putusan PN Nomor 49/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.KDI tanggal 22 Februari 2022.
Sprin.PPP-28/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 24 Maret 2022.
Pidana penjara 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan, denda Rp.100.000.000,- subsidair 3 (tiga) Bulan.
28. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk tahun pajak 2016, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait

dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 atas nama Terpidana DADAN RAMDANI (Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/04/DIK.00/01/02/2021, tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 531/DIK.02.00/23/09/2021 tanggal 13 September 2021. Sprin.Juk Nomor: 71/TUT.01.00/24/09/2021 tanggal 13 September 2021. Putusan PN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2022.
Sprin.PPP-29/Eks.00.01/01-26/03/2022 tanggal 31 Maret 2022.
Pidana Penjara 6 (enam) tahun, denda Rp.300.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, uang pengganti Rp.3.386.253.315,-.

April

29. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh ybs selaku Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 dari Suharjito dan kawan-kawan atas nama Terpidana EDHY PRABOWO (Anggota DPR RI/Menteri Kelautan dan Perikanan RI). Sprin.Dik/73/DIK.00/01/11/2020, tanggal 25 November 2020. Nota Dinas Nomor 257/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 24 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 31/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 24 Maret 2021. Putusan MA Nomor : 942 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022.
Sprin.PPP-30/Eks.00.01/01-26/04/2022 tanggal 1 April 2022
Pidana Penjara 5 (lima) tahun, denda Rp 400.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp.9.687.447.219,- dan USD 77.000
30. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan Persetujuan Penempatan Pembangunan Kebun Kemitraan dalam rangka perpanjangan Hak Guna Usaha Perkebunan PT Adimulia Agrolestari Tahun 2021 atas nama Terpidana SUDARSO (General Manager PT Adimulia Agrolestari). Sprin.Dik/720/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 17 Desember 2021. Sprin.Dik/78/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 720/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 17 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 97/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 17 Desember 2021. Putusan PN Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 28 Maret 2022.
Sprin.PPP-31/Eks.00.01/01-26/04/2022 tanggal 11 April 2022
Pidana Penjara 2 (dua) tahun, denda Rp 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
31. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 yang dilakukan oleh Terpidana Abdul Rozaq Muslim selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode tahun 2014 s.d. 2019. Sprin.Dik/53/DIK.00/01/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Nota Dinas Nomor 259/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 34/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 Putusan MA Nomor: 1229 K/Pid.Sus/2022 tanggal 24 Maret 2022.
Sprin.PPP-32/Eks.00.01/01-26/04/2022 tanggal 13 April 2022
Pidana Penjara 5 (lima) tahun, denda Rp 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp. 5.508.713.983,-
32. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs. Yaitu memberi hadiah atau janji kepada Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022 dkk terkait dengan proyek-proyek di Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin Tahun Anggaran 2021 atas nama Terpidana SUHANDY (swasta). Sprin.Dik/715/ DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor : 94/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Putusan PN Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 15 Maret 2022.
Sprin.PPP-33/Eks.00.01/01-26/04/2022 tanggal 14 April 2022
Pidana Penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, denda Rp 150.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan

33. Perkara TPK yang dilakukan bersama-sama dengan Agung Ilmu Mangku Negara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2014-2019 dan Syahbudin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung utara yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama Terpidana Akbar Tandaniria Mangku Negara (PNS). Sprin.Dik/25/DIK.00/01/04/2021, tanggal 13 April 2021. Nota Dinas Nomor 708/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 91/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Putusan PN Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk tanggal 13 April 2022. Sprin.PPP-34/Eks.00.01/01-26/04/2022 tanggal 27 April 2022. Pidana Penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp. 3.200.000.000,-

Mei

34. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 atas nama Terpidana MALIKI (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kab Hulu Sungai Utara). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 12/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 02/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Putusan PN 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tanggal 13 April 2022. Sprin.PPP-35/Eks.00.01/01-26/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Pidana Penjara 6 (enam) tahun, denda Rp. 250.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp 195.000.000,-
35. Perkara TPK terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan bebas an pelabuhan bebas Bintang Wilayah Kabupaten Bintang Tahun 2016 s.d. 2018 yang dilakukan oleh ybs selaku Bupati Bintang Ex Officio Wakil Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang atas nama Terpidana APRI SUJADI (Bupati Bintang). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/02/2021 tanggal 17 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 705/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor 92/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Putusan PN 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg tanggal 21 April 2022. Sprin.PPP-36/Eks.00.01/01-26/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Pidana Penjara 5 (lima) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan, uang pengganti Rp. 2.650.000.000,-
36. Perkara TPK terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan bebasan pelabuhan bebas Bintang Wilayah Kabupaten Bintang Tahun 2016 s.d. 2018 atas nama Terpidana MOHD. SALEH H. UMAR (Plt. Kepala Badan Pengusahaan Bintang). Sprin.Dik/10/DIK.00/01/02/2021, tanggal 17 Februari 2021. Sprin.Juk Nomor: 93/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Putusan PN 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg tanggal 21 April 2022. Sprin.PPP-37/Eks.00.01/01-26/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Pidana Penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp. 415.000.000,-
37. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penerbitan perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Kota Cimahi Tahun 2018 s.d. 2020 yang dilakukan oleh Ybs selaku Wali Kota Cimahi Periode 2017 s.d. 2022 atas nama Terpidana AJAY MUHAMMAD PRIATNA (Wali Kota Cimahi Periode 2017 s.d. 2022). Sprin.Dik/76/DIK.00/01/11/2020 tanggal 28 November 2020. Nota Dinas Nomor 258/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 33/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 25 Maret 2021. Putusan MA Nomor: 1122

K/Pid.Sus/2022 tanggal 17 Maret 2022

Sprin.PPP-38/Eks.00.01/01-26/05/2022 tanggal 18 Mei 2022.

Pidana Penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan

Juni

38. Perkara TPK bersama-sama dengan penyelenggara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama terpidana I INDRA GANI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana II ISHAK JOHARSAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana III Piardi (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana IV SUBAHAN (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana V MARDIANSAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana VI FITRIANZAH (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana VII MARSITO (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana VIII MUHARDI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana IX ARI YOCA SETIAJI (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim), Terpidana X AHMAD REO KOSUMA (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim),
Sprin.Dik/58/DIK.00/01/09/2021, Sprin.Dik/59/DIK.00/01/09/2021,
Sprin.Dik/63/DIK.00/01/09/2021, Sprin.Dik/64/DIK.00/01/09/2021,
Sprin.Dik/60/DIK.00/01/09/2021, Sprin.Dik/57/DIK.00/01/09/2021,
Sprin.Dik/61/DIK.00/01/09/2021, Sprin.Dik/62/DIK.00/01/09/2021,
Sprin.Dik/56/DIK.00/01/09/2021, Sprin.Dik/55/DIK.00/01/09/2021 tanggal 16 September 2021
Nota Dinas Nomor 774/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 775/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 780/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 779/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 776/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 773/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 777/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 778/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 772/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 771/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 27 Desember 2021
Sprin.Juk Nomor: 106/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 100/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 108/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 109/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 107/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 105/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 101/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 102/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 104/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 103/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 27 Desember 2021. Putusan PN 04/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 25 Mei 2022.
Sprin.PPP-39/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 7 Juni 2022.
Pidana Penjara masing-masing 4 (empat) tahun, denda masing-masing Rp. 200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan, uang pengganti Rp. 2.150.000.000,-
39. Perkara TPK orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupten Penajam Paset Utara atas nama Terpidana AHMAD ZUHDI ALIAS YUDI (Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri d/a perumahan Rawa Indah, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/12/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 114/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 11 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor

- 20/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 11 Maret 2022. Putusan PN 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 31 Mei 2022.
Sprin.PPP-40/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 7 Juni 2022.
Pidana Penjara 2 (dua) tahun 3 (bulan), denda Rp. 100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan
40. Perkara TPK memberi hadiah atau janji yang dilakukan oleh ybs selaku Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 kepada Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan ybs selaku Walikota Tanjung Balai atas nama Terpidana M. SYAHRIAL (Walikota Tanjung Balai Periode 2016-2021 dan 2021-2024). Sprin.Dik/31/DIK.00/01/04/2021 tanggal 22 April 2021. Nota Dinas Nomor 68/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 31 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 07/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 31 Januari 2022. Putusan PN 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 30 Mei 2022.
Sprin.PPP-46/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 17 Juni 2022.
Pidana Penjara 4 (empat) tahun, denda Rp 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan
41. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia yang secara bersama-sama dengan Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Dirgantara dan Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia, dkk dalam kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d. 2017 atas nama Terpidana BUDIMAN SALEH (Direktur Aircraft Integration PT Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2010 s.d. 2012 dan Direktur Niaga Restrukturisasi PT Dirgantara Indoensia (Persero) tahun 2012 s.d. 2017). Sprin.Dik/26/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 177/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 1 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 24/TUT.01.00/24/03/2020 tanggal 1 Maret 2021. Putusan MA 1411 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 7 April 2022.
Sprin.PPP-47/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 17 Juni 2022.
Pidana Penjara 10 (sepuluh) tahun, denda Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp 686.185.000,-
42. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs selaku Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia yang secara bersama sama atau turut serta dengan Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia dan Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia, dkk dalam kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d. 2017 atas nama Terpidana ARIE WIBOWO (Pensiunan Pegawai PT Dirgantara Indonesia (Persero)). Sprin.Dik/27/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 188/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 26/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Putusan MA 1415 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 7 April 2022.
Sprin.PPP-48/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 17 Juni 2022
Pidana Penjara 10 (sepuluh) tahun, denda Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp. 894.099.209,-
43. Perkara TPK dalam kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia Tahun 2007 s.d. 2017 yang dilakukan oleh ybs selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bersama-sama dengan Irzal Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT Abadi Sentosa Perkasa atas nama Terpidana DIDI LAKSAMANA (Swasta/Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa). Sprin.Dik/28/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 201/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 5 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 27/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 8 Maret 2021. Putusan MA 1413 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 April 2022.
Sprin.PPP-49/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 17 Juni 2022.
Pidana Penjara 13 (tiga belas) tahun, denda Rp. 650.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan, uang pengganti Rp. 37.704.181.000,-

44. Perkara TPK mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016 yang dilakukan oleh ybs selaku Direktur PT Wahyu Daya Mandiri bersama-sama dengan tsk Budi Adi Prabowo selaku Direktur Produksi PTPN XI atas nama Terpidana ARIF HENDRAWAN (Direktur PT Wahyu Daya Mandiri). Sprin.Dik/72/DIK.00/01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 786/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 113/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Putusan PN Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2022.
Sprin.PPP-50/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 7 Juni 2022
Pidana Penjara 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, denda Rp. 100.000.000,-, subsidair 2 (dua) bulan, uang pengganti Rp. 14.044.121.502,-
45. Perkara TPK yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh ybs masing-masing selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2014-2019 atas nama Terpidana I FAHRURROZI (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019), Terpidana II ARRAKHMAT EKA PUTRA (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019), Terpidana III WIWID ISWHARA (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019), Terpidana IV ZAINUL ARFAN (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020. Nota Dinas Nomor 619/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor: 81/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 Putusan PT Nomor: 5/Pid-TPK/2022/PT JMB tanggal 18 Mei 2022.
Sprin.PPP-51/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 21 Juni 2022.
Pidana Penjara Terpidana I 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, Terpidana II 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, Terpidana III 5 (lima) Tahun, Terpidana IV 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, denda masing-masing Rp. 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan, uang pengganti Rp 750.000.000,-
46. Perkara TPK proyek peningkatan jalan lingkar bukit batu-siak kecil (multi years) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh ybs atas nama Terpidana I Melia Boentaran (Direktur PT Arta Niaga Nusantara) dan Terpidana II Handoko Setiono (Pensiunan Wiraswasta).
Sprin.Dik/11/DIK.00/01/01/2020 & Sprin.Dik/10/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor 389/DIK.02.00/23/06/2021 & Nota Dinas Nomor 390/DIK.02.00/23/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. Sprin.Juk Nomor : 50/TUT.01.00/24/06/2021 dan Sprin.Juk Nomor : 51/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. Putusan MA 2162 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 7 Juni 2022.
Sprin.PPP-52/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 23 Juni 2022.
Pidana Penjara masing-masing 4 (empat) tahun, denda masing-masing Rp 200.000.000,- subsidair 6 bulang, uang pengganti Terpidana I 114.594.000.181
47. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs bersama-sama dengan Ir. Djoko Saputro selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II terkait pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun Anggaran 2017 atas nama Terpidana Andirini Yaktiningsih. Sprin.Dik/173/DIK.00/01/11/2018 Tanggal 28 November 2018. Nota Dinas Nomor 787/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 111/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 29 Desember 2021. Putusan 10/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 6 Juni 2022.
Sprin.PPP-53/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 23 Juni 2022.
Pidana Penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 400.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan, uang pengganti Rp. 2.684.909.691,-
48. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs berupa pemberian hadiah atau janji kepada DR. dr. Herman Sutrisno selaku Walikota Banjar periode 2008-2013 terkait proyek pada dinas PUPR kota Banjar atas nama Terpidana RAHMAT WARDI (Wiraswasta).

- Sprin.Dik/42/DIK.00/01/06/2020 tanggal 30 Juni 2020. Nota Dinas Nomor 87/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 17 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 42/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 20 April 2022 Putusan PN Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 25 Mei 2022.
Sprin.PPP-54/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 29 Juni 2022.
Pidana Penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan
49. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama Tahun 2021 dan memberi hadiah atau janji terkait pengisian tenaga kontrak di Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022 yang dilakukan oleh ybs atas nama Terpidana ALI AMRIL (Direktur PT MAM Energindo). Sprin.Dik/03/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 105/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 15/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 6 Juni 2022
Sprin.PPP-55/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 29 Juni 2022.
Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan, denda Rp. 150.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan
50. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara pada Pemerintah Kota Bekasi terkait pengadaan lahan di wilayah Kota Bekasi tahun 2021 yang dilakukan oleh ybs atas nama Terpidana MAKHFUD SAIFUDIN (PNS). Sprin.Dik/04/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 108/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 16/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 6 Juni 2022.
Sprin.PPP-56/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 29 Juni 2022.
Pidana Penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan
51. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama Tahun 2021 dan memberi hadiah atau janji terkait pengisian tenaga kontrak di Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022 yang dilakukan oleh ybs atas nama Terpidana LAI BUI MIN (Wiraswasta). Sprin.Dik/01/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 106/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 17/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022. Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 6 Juni 2022.
Sprin.PPP-57/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 29 Juni 2022.
Pidana Penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan
52. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama Tahun 2021 dan memberi hadiah atau janji terkait pengisian tenaga kontrak di Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022 yang dilakukan oleh ybs atas nama Terpidana SURYADI MULYA. Sprin.Dik/02/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 107/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 4 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 18/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 04 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 6 Juni 2022.
Sprin.PPP-58/Eks.00.01/01-26/06/2022 tanggal 29 Juni 2022.
Pidana Penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.

Juli

53. Perkara TPK secara berlanjut memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DAK APBN) Tahun 2017, Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (DAK APBN-P) Tahun anggaran 2017 dan DAK APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Dumai yang dilakukan oleh ybs atas nama terpidana Zulkifli AS Als Zulkifli Adnan Singkah Walikota Dumai (periode tahun 2016-2021).

- Sprin.Dik/35/DIK.00/01/04/2019 tanggal 22 April 2019. Nota Dinas Nomor 221/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 28/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. Putusan MA Nomor 926 K/Pid.Sus/2022 tanggal 17 Maret 2022
Sprin.PPP-59/Eks.00.01/01-26/07/2022 tanggal 1 Juli 2022.
Pidana Penjara 5 (lima) tahun, denda Rp. 250.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan
54. Perkara TPK bersama dengan Waryono Karno dalam kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral bahan bakar minyak bersubsidi, kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi dan perawatan gedung kantor sekretariat jenderal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012 atas nama terpidana Sri Utami (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Sprin.Dik-23/01/03/2017 Tanggal 31 Maret 2017. Nota Dinas Nomor 67/DIK.02.00/23/01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Sprin.Juk Nomor 06/TUT.01.00/24/01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Putusan PN Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2022.
Sprin.PPP-60/Eks.00.01/01-26/07/2022 tanggal 6 Juli 2022.
Pidana Penjara 4 (empat) tahun, denda Rp 250.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan
55. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dengan maksud supaya penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama Terpidana Muara Perangin angin (Wiraswasta). Sprin.Dik/21/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 125/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 18 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 23/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 18 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juni 2022.
Sprin.PPP-61/Eks.00.01/01-26/07/2022 tanggal 12 Juli 2022.
Pidana Penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan
56. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun anggaran 2017 s.d. 2019 yang dilakukan oleh ybs. Selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 2014 s.d. 2019 dan 2019 s.d. 2024 atas nama terpidana Siti Aisyah Tuti Handayani (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat 2014 s.d. 2019). Sprin.Dik/474/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor : 65/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Putusan PN Nomor: 59/PID.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 3 November 2021.
Sprin.PPP-62/Eks.00.01/01-26/07/2022 tanggal 15 Juli 2022
Pidana Penjara 3 (tiga) tahun, denda Rp 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan
57. Perkara TPK yaitu setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015 atas nama terpidana Lissa Rukmi Utari (Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa dan Direktur Utama PT Waindo Specterra Indonesia). Sprin.Dik/57/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Nota Dinas Nomor 378/DIK.02.00/23/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Sprin.Juk Nomor : 48/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Putusan PN Nomor: 49/PID.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2021.
Sprin.PPP-64/Eks.00.01/01-26/07/2022 tanggal
Pidana Penjara 9 (sembilan) tahun, denda Rp 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
58. Perkara TPK yaitu setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Citra

Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015 atas nama Terpidana I Priyadi Kardono (Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)) dan Terpidana II Muchamad Muchlis (Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Pusfatekgan Lapan) Periode Tahun 2013 s.d. 2015). Sprin.Dik/55/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Sprin.Dik/56/DIK.00/01/09/2020 tanggal 28 September 2020. Nota Dinas Nomor 376/DIK.02.00/23/05/2021 & Nota Dinas Nomor 377/DIK.02.00/23/05/2021 tanggal 19 Mei 2021. Sprin.Juk Nomor: 46/TUT.01.00/24/05/2021 & Sprin.Juk Nomor 47/TUT.01.00/24/05/2021 tanggal 19 Mei 2021.
Putusan PN Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2021.
Sprin.PPP-65/Eks.00.01/01-26/07/2022 tanggal 22 Juli 2022.
Pidana Penjara masing-masing 6 (enam) Tahun, denda masing-masing Rp 250.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.

Agustus

59. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun anggaran 2017 s.d. 2019 yang dilakukan oleh ybs selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014 s.d. 2019 atas nama Terpidana Ade Barkah Surahman (Anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat 2014 s.d. 2019 dan 2019 s.d. 2024 (Wakil Ketua DPRD Tahun 2016 s.d. Sekarang). Sprin.Dik/11/DIK.00/01/02/2021 tanggal 22 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 475/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 64/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Putusan PN Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 3 November 2021.
Sprin.PPP-66/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022.
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
60. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh ybs. Bersama dengan Paut Syakarini dan Zumi Zola Zulkifli atas nama Terpidana Apif Firmansyah (Anggota DPRD Prov. Jambi 2019-2024). Sprin.Dik/34/DIK.00/01/06/2021 tanggal 18 Juni 2021. Nota Dinas Nomor 98/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 1 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor 13/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 01 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 21 Juli 2022.
Sprin.PPP-67/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
61. Perkara TPK bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pembahasan RAPBD.P TA 2014 dan atau RAPBD TA 2015 pada Provinsi Riau atas nama terpidana Annas Maamun (Mantan Gubernur Provinsi Riau Periode Tahun 2009-2014) Sprin.Dik-01/01/01/2015. Nota Dinas 175/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 18 April 2022. Sprin.Juk Nomor 41/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 18 April 2022. Putusan PN Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PBR tanggal 28 Juli 2022.
Sprin.PPP-69/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
Penjara pidana 1 (satu) tahun, denda Rp. 100.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan.
62. Perkara TPK bersama-sama dengan penyelenggara negara Drs. Wenny Bukamo selaku Bupati Banggai Laut 2016-2021 yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banggai Laut

- Tahun 2020 atas nama terpidana Recky Suhartono Godiman (Wiraswasta) Sprin.Dik/85/DIK.00/01/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Nota Dinas Nomor 293/DIK.02.00/23/04/2021 tanggal 1 April 2021. Sprin.Juk Nomor : 39/TUT.01.00/24/04/2021 tanggal 1 April 2021. Putusan PN Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 3 September 2021
Sprin.PPP-70/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan
63. Perkara TPK yaitu Penyelenggara Negara yang bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dan atau penerimaan-penerimaan lainnya yang diduga dilakukan oleh Ybs atas nama terpidana Juarsah (Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020). Sprin.Dik/02/DIK.00/01/01/2021 tanggal 20 Januari 2021. Nota Dinas Nomor 399/DIK.02.00/23/06/2021 tanggal 14 Juni 2021. Sprin.Juk Nomor : 52/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 14 Juni 2021. Putusan MA 2213 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Juni 2022.
Sprin.PPP-71/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
64. Perkara TPK yang dilakukan oleh Tersangka AA Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat Periode 2018-2023 dan kawan-kawan, yaitu baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya terkait Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dan atau melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Korupsi atas nama terpidana AA Umbara Sutisna (Bupati Bandung Barat Periode 2018-2023) Sprin.Dik/17/DIK.00/01/02/2020, tanggal 26 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 463/DIK.02.00/23/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Sprin.Juk Nomor: 62/TUT.01.00/24/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021. Putusan MA 2910 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 Juli 2022.
Sprin.PPP-72/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
Pidana Penjara 5 (lima) tahun, denda Rp. 250.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
65. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait proyek pembangunan jalan dalam kota namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 bersama-sama dengan JOHNY RYNHARD KASMAN atas nama Terpidana Ivana Kwelju (Wiraswasta/Direktur Utama PT VICI CITRA KENCANA). Sprin.Dik/43/DIK.00/01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor 202/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Agustus 2022.
Sprin.PPP-73/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022.
Pidana penjara 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan, denda Rp. 60.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan
66. Perkara TPK yang dilakukan oleh Ybs selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan kawan-kawan, terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kementerian Dalam Negeri RI Tahun anggaran 2011 atas nama terpidana Dono Purwoko (Direktur Utama PT. Harmand Intimarin Indonesia (Kepala Divisi Konstruksi VI Makassar pada PT Adhi Karya Tahun 2011 sd 2014). Sprin.Dik/135/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018. Nota Dinas Nomor 111/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 9 Maret 2022. Sprin.Juk Nomor

- 19/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 09 Maret 2022. Putusan PN Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Agustus 2022.
Sprin.PPP-74/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022.
Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
67. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta penerimaan lainnya yang dilakukan oleh tersangka selaku Bupati Purbalingga periode tahun 2016 s.d. 2021 bersama dengan kawan-kawan atas nama terpidana Tasdi. Nota Dinas Nomor:550/DIK.02.00/23/09/2018 tanggal 27 September 2018. Sprin.Juk Nomor: 103/TUT.01.00/24/09/2018 tanggal 27 September 2018. Putusan PK Nomor: 74 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Maret 2022
Sprin.PPP-76/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
Pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 300.000.000,-, sama dengan putusan PN sehingga tidak di masukan kembali, subsidair 4 (empat) bulan.
68. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014 atas nama terpidana Suheri Tertra (Eks Bagian Humas dan Legal (Manager Perizinan dan Dokumentasi) Duta Palma Group Kantor Pekanbaru (Riau). Sprin.Dik/29/DIK.00/01/03/2019 tanggal 29 Maret 2019. Nota Dinas Nomor 174/DIK.02.00/23/06/2020 tanggal 3 Juni 2020. Putusan PN Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 9 September 2020.
Sprin.PPP-77/Eks.00.01/01-26/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
Pidana penjara: bebas.

September

69. Perkara TPK penerimaan sesuatu hadiah atau janji selaku supervisor Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Angin Prayitno Aji terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak 2016 & Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama terpidana Wawan Ridwan (PNS pada Ditjen Pajak) Sprin.Dik/881/DIK.02.00/23/012/2021, Sprin.Dik/882/DIK.02.00/23/012/2021, Sprin.Dik/883/DIK.02.00/23/012/2021 tanggal 31 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 881/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 882/DIK.02.00/23/12/2021, Nota Dinas Nomor 883/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. 123/TUT.01.00/24/12/2021, Sprin.Juk Nomor: 124/TUT.01.00/24/12/2021, 125/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Putusan PN Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2022.
Sprin.PPP-80/Eks.00.01/01-26/09/2022 tanggal 13 September 2022.
Pidana penjara 9 (sembilan) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
70. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji kepada Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bersama sama dengan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dkk terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016 atas nama Terpidana I Aulia Imran Maghribi (Partner Konsultan Pajak di Foresight

Consulting) dan Terpidana II Ryan Ahmad Ronas (Partner Konsultan Pajak di Foresight Consulting).

Sprin.Dik/05/DIK.00/01/02/2021 & Sprin.Dik/06/DIK.00/01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 172/DIK.02.00/23/04/2022 & Nota Dinas Nomor 173/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 14 April 2022. Sprin.Juk Nomor 39/TUT.01.00/24/04/2022 & Sprin.Juk Nomor 40/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 14 April 2022. Putusan PN Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2022.

Sprin.PPP-81/Eks.00.01/01-26/09/2022 tanggal 13 September 2022.

Pidana penjara Terpidana I 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan Terpidana II 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, denda masing-masing Rp 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.

71. Perkara TPK bersama-sama dengan penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 atas nama terpidana Terpidana I Agus Firmansyah (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim) dan Terpidana II Ahmad Fauzi (Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim) Sprin.Dik/87/DIK.00/01/11/2021 & Sprin.Dik/88/DIK.00/01/11/2021 tanggal 22 November 2021. Sprin.Juk Nomor 24/TUT.01.00/24/04/2022 & Sprin.Juk Nomor 27/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Nota Dinas Nomor 167/DIK.02.00/23/04/2022 & Nota Dinas Nomor 153/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 11 April 2022.

Sprin.Juk Nomor 24/TUT.01.00/24/04/2022 & Sprin.Juk Nomor 27/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 11 April 2022. Putusan PN Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2012/PN Plg tanggal 7 September 2022.

Sprin.PPP-86/Eks.00.01/01-26/09/2022 tanggal 30 September 2022.

Pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun, denda masing-masing Rp. 200.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan.

72. Perkara TPPU berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama terpidana Yudi Widiana Adia (Anggota DPR RI/Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS). Sprin.Dik-13/DIK.00/01/01/2018 Tanggal 19 Januari 2018. Nota Dinas Nomor 693/DIK.02.00/23/11/2021 tanggal 26 November 2021. Sprin.Juk Nomor: 90/TUT.01.00/24/11/2021 tanggal 26 November 2021.

Putusan PN 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 6 September 2022.

Sprin.PPP-87/Eks.00.01/01-26/09/2022 tanggal 30 September 2022.

Pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, denda Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.

Oktober

73. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 nama terpidana Terpidana I Abdul Gafur Mas'ud (Bupati Penajam Paser Utara Periode 2018-2023) dan Terpidana II Nur Afifah Balqis (Pelajar/Mahasiswa (Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 & Sprin.Dik/17/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 231/DIK.02.00/23/05/2022 & Nota Dinas Nomor 230/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 55/TUT.01.00/24/05/2022 & Sprin.Juk Nomor 51/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 26 September 2022.

Sprin.PPP-88/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022

Pidana penjara Terpidana I 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan Terpidana II 4 (empat)

- Tahun 6 (enam) Bulan, denda masing-masing Rp 300.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
74. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan serta penerimaan lainnya di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan ybs atas nama Terpidana I Muliadi (Plt. Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Sejak tahun 2021), Terpidana II Edi Hasmoro (PNS (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara), Terpidana III Jusman (PNS (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara). Sprin.Dik/14/DIK.00/01/01/2022, Sprin.Dik/15/DIK.00/01/01/2022, Sprin.Dik/16/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 232/DIK.02.00/23/05/2022, Nota Dinas Nomor 228/DIK.02.00/23/05/2022, Nota Dinas Nomor 229/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 12 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 52/TUT.01.00/24/05/2022, Sprin.Juk Nomor 53/TUT.01.00/24/05/2022 & Sprin.Juk Nomor 54/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 26 September 2022. Sprin.PPP-89/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Pidana penjara Terpidana I dan II 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Terpidana III 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda masing-masing Rp. 300.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
 75. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan pada Tahun 2018 atas nama terpidana Kayat (Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/05/2019 tanggal 04 Mei 2019. Nota Dinas Nomor: 444/DIK.02.00/23/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Sprin.Juk Nomor: 108/TUT.01.00/24/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Putusan PN Nomor:23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr tanggal 08 Januari 2020. Sprin.PPP-90/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022. Pidana penjara sama dengan Putusan PN, denda sama dengan putusan PN.
 76. Perkara TPK dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangam bebas dan pelabuhan bebas sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 sd. TA 2011 yang dilakukan oleh ybs atas nama terpidana PT Nindya Karya (Persero). Sprin.Dik/790/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Dik/30/DIK.00/01/02/2018 Tgl. 19 Februari 2018. Nota Dinas Nomor 790/DIK.02.00/23/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor: 118/TUT.01.00/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Putusan PN Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 22 September 2022. Sprin.PPP-91/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022. Pidana penjara -, denda Rp. 900.000.000,-
 77. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) Tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co, Ltd (HDHM) dari China sebagai penyedia barang atas nama terpidana Richard Joost Lino alias R.J. Lino (Wiraswasta/Mantan Karyawan BUMN/Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indoensia II (Persero)). Sprin.Dik-55/01/12/2015. Nota Dinas Nomor 443/DIK.02.00/23/07/2021 tanggal 19 Juli 2021. Sprin.Juk Nomor: 56/TUT.01.00/24/07/2021 tanggal 19 Juli 2021. Putusan PN Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2021. Sprin.PPP-94/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022. Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 500.000.000, subsidair 6 (enam) bulan.
 78. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 atas nama terpidana Herman Mayori (PNS/Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin). Sprin.Dik/75/DIK.00/01/10/2021 tanggal 16 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor

- 80/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 10/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Putusan PT 25/Pid.Sus-TPK/2022/PT.Plg tanggal 12 September 2022.
Sprin.PPP-95/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
79. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 atas nama terpidana Eddy Umari (PNS/Kepala Bidang SDA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin). Sprin.Dik/74/DIK.00/01/10/2021, tanggal 16 Oktober 2021. Nota Dinas Nomor 81/DIK.02.00/23/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Sprin.Juk Nomor 09/TUT.01.00/24/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. Putusan PT 26/Pid.Sus-TPK/2022/PT.Plg tanggal 12 September 2022.
Sprin.PPP-96/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
80. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabuapten Bogor Tahun Anggaran 2021 atas nama Terpidana I Ihsan Ayatullah (Kepala Sub Bidang Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor), Terpidana II Maulana Adam (Sekretaris Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bogor), Terpidana III Rizki Taufik Hidayat (Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2, Dinas PUPR Kabupaten Bogor sekaligus PPK) Rizki Taufik Hidayat. Sprin.Dik/38/DIK.00/01/04/2022 tanggal 27 April 2022. Nota Dinas Nomor 306/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 24 Juni 2022. Sprin.Juk Nomor 72/TUT.01.00/24/06/2022 tanggal 24 Juni 2022. Putusan PN Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 23 September 2022.
Sprin.PPP-97/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022
Pidana penjara Terpidana I 4 (empat) Tahun dan Terpidana II dan Terpidana III 2 (dua) Tahun, denda Terpidana I Rp. 100.000.000,- Terpidana II dan Terpidana III Rp. 50.000.000,- subsidair Terpidana I 6 (enam) Bulan, Terpidana II dan Terpidana III 2 (dua) Bulan
81. Perkara TPPU setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama terpidana Rohadi (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara) Sprin.Dik-57/01/08/2016. Nota Dinas Nomor 14/DIK.02.00/23/01/2021 tanggal 7 Januari 2021. Sprin.Juk Nomor 02/TUT.01.00/24/01/2021 tanggal 7 Januari 2021. Putusan MA Nomor 1551 K/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022
Sprin.PPP-98/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp 300.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
82. Perkara TPK yang dilakukan oleh ybs selaku mitra penjualan PT Dirgantara Indonesia yang secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia dan tersangka Irzal Rinaldi Zailani selaku Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia dan kawan-kawan dalam kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia tahun 2007 s.d. 2017 atas nama terpidana Ferry Santosa Subrata. Sprin.Dik/29/DIK.00/01/03/2020 tanggal 12 Maret 2020. Nota Dinas Nomor 189/DIK.02.00/23/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Sprin.Juk Nomor 25/TUT.01.00/24/03/2021 tanggal 2 Maret 2021. Putusan MA Nomor: 1553 K/Pid.Sus/2022 tanggal 3 Oktober 2022
Sprin.PPP-99/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 300.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan
83. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana pemulihan

- ekonomi nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 yang dilakukan oleh Ybs selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri periode Juli 2020 sampai dengan November 2021 dan kawan-kawan atas nama terpidana Mochamad Ardian Noervianto (PNS Kementerian Dalam Negeri). Sprin.Dik/102/DIK.00/01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. Nota Dinas Nomor 266/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 68/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Putusan PN Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 28 September 2022. Sprin.PPP-100/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp. 250.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
84. Perkara TPK menerima hadiah atau janji Terkait pengadaan lahan di wilayah Kota Bekasi Tahun 2021 atas nama terdakwa Wahyudin (Camat Jatisampurna-Bekasi). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 207/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 47/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022. Sprin.PPP-101/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022. Pidana Penjara 4 (empat) tahun, denda Rp 250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
85. Perkara TPK menerima hadiah atau janji Terkait pengadaan lahan di wilayah Kota Bekasi Tahun 2021 atas nama Terpidana Jumhana Luthfi Amin (Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi). Sprin.Dik/08/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 206/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 46/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022. Sprin.PPP-102/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal tanggal 26 Oktober 2022. Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp 250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
86. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan lahan tahun 2021, proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama tahun 2021 dan pengisian tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022, meminta dan menerima pembayaran dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi dan penerimaan lain terkait jabatannya atas nama terpidana Muhamad Bunyamin (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP). Sprin.Dik/06/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 204/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 44/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022. Sprin.PPP-103/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022. Pidana penjara 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, denda Rp 250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
87. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengadaan lahan tahun 2021, proyek pembangunan Gedung Teknis Bersama tahun 2021 dan pengisian tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022, meminta dan menerima pembayaran dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi dan penerimaan lain terkait jabatannya atas nama Terpidana Mulyadi alias Bayong (Lurah Jati Sari-Bekasi). Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2022 tanggal 6 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 205/DIK.02.00/23/04/2022 tanggal 28 April 2022. Sprin.Juk Nomor 45/TUT.01.00/24/04/2022 tanggal 28 April 2022. Putusan PN 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022. Sprin.PPP-104/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022. Denda Rp 250.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
88. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019 terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Terpidana SAMIN TAN (Pemilik PT Borneo Lumbang Energi &

Metal). Sprin.Dik/17/DIK.00/01/02/2019 Tanggal 01 Februari 2019. Sprin.Juk Nomor 49/TUT.01.00/24/06/2021 tanggal 03 Juni 2021. Putusan MA 2205 K /Pid.Sus/2022 tanggal 9 Juni 2022.

Sprin.PPP-105/Eks.00.01/01-26/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

Pidana penjara : bebas.

November

89. Perkara TPK selaku Penyelenggara Negara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lapas Klas I Sukamiskin yang diduga dilakukan terpidana Wahid Husein (selaku Kalapas Sukamiskin). Sprin.Dik/100/DIK.00/01/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Nota Dinas Nomor 313/DIK.02.00/23/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Sprin.Juk Nomor : 72/TUT.01.00/24/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
Putusan PK Nomor: 663 PK/Pid.Sus-TPK/2022 tanggal 3 Agustus 2022.
Sprin.PPP-106/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 1 November 2022.
Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda Rp 400.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.
90. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama Terpidana ADI WIBOWO (Kadiv Waskita Karya BUMN). Sprin.Dik/133/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018. Nota Dinas Nomor 220/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 50/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Putusan PN 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2022.
Sprin.PPP-107/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 2 November 2022
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp 200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
91. Perkara TPK bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Terpidana M Hamdan (PNS (Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya)). Sprin.Dik/27/DIK.00/01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 248/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 62/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Putusan PN 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 11 Oktober 2022.
Sprin.PPP-108/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 2 November 2022.
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp 250.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
92. Perkara TPK setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili Tindak pidana terkait dengan Permohonon Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa RM Hendro Kasiono (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/26/DIK.00/01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022. Nota Dinas Nomor 246/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 61/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 19 Mei 2022. Putusan PN 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2022.
Sprin.PPP-109/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 2 November 2022.
Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp 200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
93. Perkara TPK yaitu penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten

- Langkat atas nama Terpidana I Marcos Surya Abdi (Wiraswasta) dan Terpidana II Shuhanda Citra, Terpidana III Isfi Syahfitra Sprin.Dik/24/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022
Sprin.Dik/24/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022
Sprin.Dik/23/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022
Sprin.Dik/22/DIK.00/01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022
Nota Dinas Nomor 240/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022
Nota Dinas Nomor 239/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022
Nota Dinas Nomor 238/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 18 Mei 2022
Sprin.Juk Nomor 58/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022
Sprin.Juk Nomor 57/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022
Sprin.Juk Nomor 56/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 18 Mei 2022
Putusan PN 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN,Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022
Sprin.PPP-110/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 4 November 2022.
Pidana penjara Terpidana I 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, Terpidana II dan III 5 (lima) tahun, denda Terpidana I Rp. 300.000.000,- Terpidana II dan III Rp 250.000.000,- subsidair Terpidana I 5 (lima) bulan, Terpidana II dan III 3 (tiga) bulan.
94. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021 atas nama terpidana LAODE M SYUKUR AKBAR (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna).
Sprin.Dik/104/DIK.00/01/12/2021, tanggal 9 Desember 2021. Sprin.Juk Nomor : 65/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 23 Mei 2022. Putusan PN 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 28 September 2022.
Sprin.PPP-112/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 9 November 2022.
Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp 250.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
95. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terpidana TIGOR PRAKASA yaitu memberi hadiah atau janji kepada SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung periode 2013-2018 dan kawan-kawan, terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung.
Sprin.Dik/26/DIK.00/01/04/2021 tanggal 13 April 2021. Nota Dinas Nomor 212/DIK.02.00/23/05/2022 tanggal 9 Mei 2022. Sprin.Juk Nomor 49/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 09 Mei 2022. Putusan PT 59/Pid.Sus-TPK/2022/PT.Sby tanggal 6 Oktober 2022.
Sprin.PPP-113/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 11 November 2022.
Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp 150.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan
96. Perkara TPK dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Terpidana I HUSNI FAHMI selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi dalam rangka penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) dan Terpidana II ISNU EDHI WIJAYA selaku Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
Sprin.Dik/84/DIK.00/01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
Sprin.Dik/83/DIK.00/01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019
Nota Dinas Nomor 268/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 2 Juni 2022.
Nota Dinas Nomor 267/DIK.02.00/23/06/2022 tanggal 2 Juni 2022.
Sprin.Juk Nomor 70/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 02 Juni 2022.
Sprin.Juk Nomor 69/TUT.01.00/24/05/2022 tanggal 02 Juni 2022. Putusan PN 40/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2022.
Sprin.PPP-114/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 14 November 2022.
Pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun, masing-masing Rp 300.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan.
97. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama Terpidana Oon Nursihono (Vice President Real Estate PT. Summarecon Agung, Tbk). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Nota Dinas Nomor 330/DIK.02.00/23/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Sprin.Juk Nomor 73/TUT.01.00/24/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Putusan PN Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk tanggal 31 Oktober 2022.

Sprin.PPP-115/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 15 November 2022.

Pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda Rp. 200.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan.

98. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terpidana Drs. H. ABDUL WAHID HK, MM, M.Si selaku Bupati Hulu Sungai Utara periode 2017 sd 2022 bersama-sama dengan Maliki selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait proyek Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 dan TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan penempatan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terpidana Drs. H. ABDUL WAHID HK, MM, M.Si.

Sprin.Dik/86/DIK.00/01/11/2021, tanggal 11 November 2021

Sprin.Dik/105/DIK.00/01/12/2021 tanggal 22 Desember 2021

Nota Dinas Nomor 122/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 17 Maret 2022

Nota Dinas Nomor 123/DIK.02.00/23/03/2022 tanggal 17 Maret 2022

Sprin.Juk Nomor 21/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 17 Maret 2022

Sprin.Juk Nomor 22/TUT.01.00/24/03/2022 tanggal 17 Maret 2022

Putusan PT 13/Pid.Sus/TPK/2022/PT.BJM tanggal 5 Oktober 2022

Sprin.PPP-116/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 28 November 2022.

Pidana penjara 8 (delapan) tahun, denda Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.

99. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kab. Muara Enim Tahun 2019 atas nama terpidana Ahmad Yani selaku Bupati Kabupaten Muara Enim periode tahun 2018 s.d. 2023. Sprin.Dik/103/DIK.00/01/09/2019 tanggal 3 September 2019. Nota Dinas Nomor: 675/DIK.02.00/23/12/2019 tanggal 11 Desember 2019. Sprin.Juk Nomor: 162/TUT.01.00/24/12/2019 tanggal 11 Desember 2019. Putusan PK Nomor 712 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 18 Agustus 2022.

Sprin.PPP-117/Eks.00.01/01-26/11/2022 tanggal 30 November 2022.

Pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 200.000.000,- sama seperti putusan terdahulu.

Desember

100. Perkara TPK yaitu penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang diduga dilakukan oleh terpidana MUCHAMMAD ROMA HURMUZIY (Anggota DPR RI Periode 2014-2019) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/18/DIK.00/01/03/2019 tanggal 16 Maret 2019. Nota Dinas Nomor: 410/DIK.02.00/23/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019. Sprin.Juk Nomor: 94/TUT.01.00/24/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019. Putusan MA Nomor 3019 K/Pid.Sus/2021 tanggal 21 Juli 2021.

Sprin.PPP-118/Eks.00.01/01-26/12/2022 tanggal 6 Desember 2022.

- Pidana penjara 1 (satu) tahun sudah bebas, denda Rp. 100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan
101. Perkara TPK yang dilakukan oleh Terpidana TOMMY ADRIAN (Direktur PT Adonara Propertindo) bersama-sama dengan Anja Runtuwene, Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan kawan-kawan terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sprin.Dik/15/DIK.00/01/02/2020, tanggal 24 Februari 2021. Nota Dinas Nomor 617/DIK.02.00/23/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021. Sprin.Juk Nomor : 79/TUT.01.00/24/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 7092 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022. Sprin.PPP-119/Eks.00.01/01-26/12/2022 tanggal 30 Desember 2022. Pidana penjara Terpidana I 6 (enam) Tahun, Terpidana II 5 (lima) Tahun, Terpidana III 6 (enam) Tahun, denda masing-masing Rp 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan.
